

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu)

Shearly Donso

Shearlydonso@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of research, to find out how the implementation of policies public street front parking charges in the city of Palu and factors affecting the implementation of the policy. This study analyzed four factors that affect the implementation of policies according to the theory of George C. Edward III, namely; Communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is descriptive qualitative, informants numbering five people chosen by purposive sampling. Technique data collecting by interview, observation and documentation. The results showed all four factors analyzed, 1) Communication and socialization in the bureaucratic environment quite well, the communication at the level of the structure of governance mechanisms Pakir especially with the Office of Technical Implementation Unit coordinator is not running optimally. 2) The resources in the form of means of transportation, lack of budget affects the implementation of supervision. 3) Disposition implementing agency needs to coaching, so the application of the target to the parking attendants per day will positively correlated with revenue. 4) The bureaucratic structure Perparkiran Office Technical Implementation Unit has been good, but the structure of governance mechanisms are put parking non-bureaucratic apparatus at the coordinator level ineffective. Supporting factors ; The trust of the public is still quite good and inhibiting factors Fragmentation.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak menghadapi persoalan-persoalan yang cukup sederhana namun pelik. Salah satunya adalah implementasi pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum dikota Palu hingga tahun 2015 tidak mengalami perubahan.

Implementasi kebijakan publik tersebut dari tahun ketahun diharapkan sebagai penunjang utama pendapatan asli daerah, namun demikian implementasi pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Khususnya pada sektor retribusi, dimana retribusi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dalam memantapkan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab. Kebijakan publik tentang retribusi daerah dikota Palu, salah satunya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Adapun ragam dan jenis retribusi yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, sebagai berikut :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kebijakan retribusi pelayanan jasa parkir ditepi jalan umum diatas, menurut pandangan penulis merupakan salah satu sumber retribusi yang cukup potensial bagi pendapatan asli daerah. Maka kebijakan retribusi pelayanan jasa disektor transportasi khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum ini dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikota Palu. Namun demikian, bahwa dari berbagai literatur ahli implementasi kebijakan publik berpendapat, bahwa sebaik apapun suatu kebijakan yang ditetapkan, maka tingkat keberhasilannya akan ditentukan oleh proses implementasinya.

Proses implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, berada diantara formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan, menurutnya; prakondisi “apa” yang menjadi kendala dan “apa” yang diinginkan (*output/outcomes*). Menurut pandangannya, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi dalam mewujudkan tujuan yang terkandung didalam kebijakan publik.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, (Tachjan, 2006i:26) yang

menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang akan dilaksanakan
3. Kelompok sasaran (*Target group*)

Unsur pelaksana sebagai implementor kebijakan sebagaimana yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006i:28) sebagai berikut:

”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006i:27): *”Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*.

Dengan begitu, maka unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan, berbeda dengan pada tahap fomulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan. Kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31), *”Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*.

Dalam model implementasi Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis

manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)". Pelaksanaan program atau perencanaan dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006i:35).

Kemudian unsur-unsur implementasi kebijakan publik, yaitu adanya program perencanaan dan *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: "*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berkaitan dengan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan parkir ditepi jalan umum ini, dimana dukungan dan kepercayaan kelompok sasaran (*target group*) cukup baik. Hal demikian ditunjukkan dengan aktifitas masyarakat selaku wajib retribusi yang cukup respek dengan mematuhi kewajibannya membayar retribusi jasa parkir meskipun penerapan khususnya tarif tidak sesuai peraturan daerah.

Kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum dimana subjek retribusi dalam kebijakan ini adalah parkir kendaraan bermotor berupa, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Pengertian parkir menurut Setijowarno & Frazila (2001) ada dua pengertian tentang

parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan retribusi jasa umum khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum, apakah realisasi atas kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kehendak dan tujuan yang diinginkan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah?

Gambaran umum data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 Kota Palu yang diperoleh penulis melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.118.942.585.426,93,- Realisasi pendapatan retribusi jasa umum sebesar Rp.6.012.269.277,- dan target/rencana pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum sebesar Rp.217.080.000,- dan realisasi sebesar Rp.140.049.000,- atau sebesar $\pm 64,51\%$, dari jumlah rencana atau realisasi sebesar 2,33 % dari pendapatan retribusi jasa umum, dan/atau sebesar 0,12 % dari total realisasi pendapatan asli daerah dikota Palu.

Realitas pendapatan asli daerah tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa, dari tahun ketahun pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran tidak mengalami perubahan dan belum memberikan dampak dalam konteks untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikota Palu.

Sejalan dengan padangan para ahli, bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan terlihat pada kemampuan sejauhmana pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab serta profesional dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan

asli daerah bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut mengembangkan kemandiriannya dengan memberdayakan semua potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum, maka untuk menguji proses implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan dengan pendekatan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model implementasi kebijakan publik menurut pandangannya, bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumberdaya (*Resouces*)
3. Disposisi /Sikap (*Disposisition*)
4. Struktur birokrasi (*Bureaucraitic structure*)

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa yaitu;

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang diperlukan berkenaan dengan penyampaian tujuan kebijakan yang harus disampaikan oleh atasan kepada bawahan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana memahami, apa isi kebijakan, tujuan kebijakan, kelompok target kebijakan, sehingga pelaksana dapat memahami dan mempersiapkan hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan sehingga proses implementasi kebijakan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai visi atau tujuan kebijakan.

2) Sumber daya (*resources*) :

Dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum sumber

daya memegang peranan penting, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah cukup dalam lingkup pelaksana. Demikian pula sumber daya anggaran yang tidak cukup sebagai modal investasi bagi program kebijakan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh sebab itu, apabila terdapat adanya kekurangan terhadap sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

3) Disposisi /Sikap (*Disposisition*)

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Kejujuran, tanggungjawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika dilingkungan pelaksana kebijakan didominasi oleh orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggungjawab, maka sikap dan perilaku dilingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksana kebijakan kepada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif juga perlu mendapat *reward* atau sebaliknya *funishment* bagi yang lalai, sehingga menimbulkan spirit yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan tujuan kebijakan.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucraitic structure*)

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan parkir ditepi jalan umum memiliki dua aspek, yaitu struktur birokrasi yang mengatur susunan tugas dan hirarki organisasi birokrasi yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan mekanisme. Dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum ini, mekanisme tata kelola parkir tidak dapat

digeneralisir, mekanisme sebagai cara/pola pelaksanaan. Mekanisme tata kelola parkir dibuat dan disusun sebagai teknis atau sistem pelaksanaan kebijakan yang direncanakan. Dengan demikian, mekanisme tata kelola parkir merupakan pedoman untuk mewujudkan visi kebijakan dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau pihak-pihak diluar organisasi. Menurut pandangan George C. Edward III, struktur birokrasi memiliki 2 (dua) karakteristik yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi.

- a. Standar Operasional Prosedur dapat mempengaruhi tujuan dan keberhasilan implementasi kebijakan manakala standar operasional prosedur terlalu membatasi dengan ketat ruang lingkup kerja pelaksana dalam rutinitasnya. Standar Operasional Prosedur yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Namun demikian Standar Operasional Prosedur sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas Standar Operasional Prosedur menghambat implementasi
- b. Fragmentasi menurut George C. Edward III (1980), yaitu “ *fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.* Bermakna, bahwa fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-

aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, akan semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen-komponen variabel dan indikator diatas, secara teoritis masih ada yang belum dikemukakan, namun peneliti perlu membatasi sesuai keadaan objek penelitian yang menjadi fokus dalam pengkajian dan analisis. Sebagaimana dikemukakan Sugiono (2003:38) bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

METODE

Penelitian merupakan suatu proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami yang digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci (Lincoln dan Guba dalam moleong, 2010). Senada dengan itu Sugiono (2005:1) menulis bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode

penelitian yang lebih mengutamakan makna dari generalisasi, sumber datanya adalah latar belakang yang alami, peneliti adalah instrument yang menentukan dalam proses penelitian, sedangkan data yang dihasilkan bersifat deskriptif, sementara analisis datanya dilakukan secara induktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah; Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sesuai dengan hasil yang ingin dicapai maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) metode penelitian deskriptif adalah; Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, atau menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum. Pendekatan induktif mengandung pengertian sebagai suatu cara agar manusia dalam memecahkan suatu problematika mulai dengan mencari fakta-fakta yang nyata dan murni dari pengalaman masyarakat. Dari fakta-fakta itulah ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Asyari, 1981:28). Lebih lanjut Sukandarrumidi (2004:38) menjelaskan bahwa: Pola induktif merupakan pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan

argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.

Sumber data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, Arikunto (2002: 107), ia mengemukakan sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Untuk memperoleh informasi dan data yang validasinya dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan diperoleh dari 2 sumber yaitu ; data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu, data rilis laporan institusi yang relevan, pedoman-pedoman kerja maupun referensi-referensi, angka-angka yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara:

a) Observasi atau pengamatan

Observasi atau mengobservasi adalah suatu istilah umum yang artinya semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya, (S. Arikunto 2006:222). Dalam proses pengamatan dilakukan untuk melihat seluruh aktifitas pelaksana kebijakan baik pimpinan, staf Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran, juru parkir, serta semua hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono 2005:72). Pengumpulan data yang dibutuhkan dengan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang objek yang akan diteliti yaitu kepada pelaksana kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Palu.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, restra, buku, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Jadi, dokumentasi merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan buku, surat kabar, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan parkir ditepi jalan umum.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan panduan wawancara. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat menggali informasi dari subyek, merasakan apa yang mereka alami, dimana peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara sehingga peneliti menjadi penting dalam pengumpulan data. Artinya peneliti menjadi instrumen sehingga peneliti menjadi penentu keberhasilan penelitian.

Teknik analisis data menurut Bogdan & Biklen (1992) dalam Moleong (2005:248) bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan membantu untuk mempersentasikan temuan penelitian kepada orang lain secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa didalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Milles & Huberman (1992:15-20) yang terdiri atas 3 komponen analisis data dengan pengumpulan data dan kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data dimaksudkan dalam tahap ini adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. Kegiatan dalam reduksi data ini berarti suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung secara linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan pada umumnya ditentukan oleh sejauhmana kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana, terutama dalam memahami serta menterjemahkan maksud dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada perspektif ini aparatur pelaksana memiliki peran yang cukup strategis dalam melakukan

berbagai upaya untuk mengendalikan maksud dan tujuan kebijakan. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana kebijakan aparatur pelaksana harus ditunjang oleh kemampuan dan keterampilan memadai dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pada pengamatan, bahwa secara umum implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi harapan atau program yang sudah direncanakan. Bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Palu masih perlu penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau gagal, pada dasarnya ditentukan oleh proses implementasinya. Apakah pelaksanaan kebijakan yang dijalankan sesuai petunjuk teknis serta ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kebijakan perlu mendapat dukungan dan kepercayaan dari kelompok sasaran. Program dan perencanaan untuk mencapai tujuan dapat dikatakan berhasil manakala dilihat dari sudut pandang proses, akan tetapi bisa juga dikatakan gagal apabila tidak memiliki dampak yang dihasilkan.

Untuk melakukan kajian ilmiah tentang implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum ini, maka diperlukan melalui pendekatan teori para ahli. Dalam penelitian ini, pendekatan teori yang dipergunakan peneliti yaitu, model implementasi George C.Edward III dengan empat faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan komunikasi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada

aspek sosialisasi sudah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran. Transmisi komunikasi kebijakan parkir ditepi jalan umum dapat berjalan meski hanya sebatas lingkungan birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran.

Implementor kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum pada umumnya telah mengetahui secara jelas bagaimana tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, akan tetapi dalam sosialisasinya hanya terbatas pada lingkungan pelaksana program yang tidak menyentuh koordinator lapangan, dan sosialisasinya tanpa adanya penekanan agar pelaksanaan berjalan secara efektif, efisien serta berkesinambungan.

Komunikasi yang tidak menyentuh koordinator lapangan mempengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan sehingga belum memberikan gambaran efektifnya implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Tersedianya sumberdaya yang cukup dalam proses implementasi kebijakan, akan mempermudah untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh kebijakan yang dibuat. Sumber daya dimaksud adalah tenaga kerja, keahlian, dana atau anggaran, sarana, prasarana dan lain-lain. Dalam proses implementasi kebijakan yang dimaksud sumber daya, mencakup tenaga pelaksana dalam jumlah yang cukup, keahlian dan keterampilan, anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mempermudah pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum, kesesuaian antara jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan serta jumlah sumber daya anggaran yang sesuai jumlah beban kerja dapat mengurangi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam

aktifitasnya atau interaksinya berhubungan dengan komunikasi dan informasi terkait tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Dari seluruh keterangan informan selaku nara sumber yang diwawancarai dari hasil observasi, bahwa sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya anggaran masih kurang memadai. Kondisi sumber daya yang belum memenuhi jumlah kebutuhan akan berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum dikota Palu.

3) Disposisi

Disposisi/sikap dapat diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam membangun komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kebijakan dilapangan. Membangun kepercayaan bagi kelangsungan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku pelaksana dalam menentukan arah kebijakan. Jujur, konsisten, bertanggungjawab, merupakan sikap dan perilaku dan salah satu faktor penting dalam suatu proses implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan.

Pelaksana kebijakan yang berada dibarisan terdepan tidak akan terlepas dari pengaruh situasi dilingkungannya. Sebagai manusia biasa, tentunya dalam aktifitas kesehariannya memiliki keinginan-keinginan pribadi dalam melakukan kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan demi mencapai tujuan bagi kentingan pribadi. Kejujuran, konsistensi dan bertanggungjawab merupakan indikator sikap dan perilaku yang dapat menunjukkan proses implementasi kebijakan kearah yang benar.

Arah pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pelaksana. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sangat bergantung pada kecenderungan dan kemampuan pelaksana dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang diinginkan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemampuan dan keterampilan pelaksana akan berhadapan dengan keinginan-keinginan atau pengaruh tertentu untuk memenuhi kebutuhan pribadi/individu. Sikap dan perilaku merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum. Kejujuran, komitmen, konsisten dan tanggungjawab merupakan indikator sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum. Realitas pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015, tidak menunjukkan adanya korelasi positif antara data jumlah lokasi parkir sebanyak 224 lokasi titik dengan penerapan sistem target oleh koordinator kepada juru parkir yaitu sebesar Rp.20.000,-perhari perlokasi parkir. Hal demikian menggambarkan bahwa sikap/perilaku pelaksana kebijakan parkir ditepi jalan umum tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum. Berkaitan dengan struktur birokrasi, maka hal yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut dua (2) aspek, yaitu; Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi.

a. Standar operasional prosedur

Sebagai pedoman kerja aparatur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran menunjukkan berjalan cukup baik terutama dalam membangun kemitraan. Meskipun dalam kapasitas membangun kemitraan,

semestinya berisi bukan membangun kemitraan, seharusnya melaksanakan perintah sebagaimana peraturan daerah. Namun demikian standar operasional prosedur dibuat seperti demikian adanya.

b. Fragmentasi.

Keberadaan koordinator wilayah dan koordinator lapangan yang ditunjuk dan ditetapkan kepala dinas didalam struktur mekanisme tata kelola parkir merupakan salah satu faktor yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan retribusi parkir ditepi jalan umum dikota Palu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum dikota Palu ini, dapat disimpulkan berdasarkan indikator-indikator proses implementasi kebijakan yang diteliti, yang meliputi 4 faktor berjalan cukup baik, dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi adalah, sebagai berikut :

- 1) Faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palu, adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat dengan indikator aktifnya masyarakat dalam memenuhi kewajibannya selaku pengguna jasa parkir.
- 2) Faktor penghambat adalah fragmentasi organisasi dalam struktur mekanisme tata kelola parkir telah menimbulkan rentang kendali koordinasi dalam pelaksanaan parkir ditepi jalan umum tidak efektif dalam mencapai target yang diharapkan. Koordinator wilayah maupun koordinator lapangan yang tidak berasal dari internal birokrat menghambat mekanisme sehingga tidak efektif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, maka rekomendasi kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Palu sebagai berikut :

1. Koordinator wilayah dan Koordinator lapangan, sebaiknya dari aparatur birokrasi internal untuk memudahkan pengendalian maupun pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan parkir ditepi jalan umum sebaiknya menggunakan sistem kartu parkir berlangganan untuk menghindari terjadinya distorsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian artikel ini, penulis banyak mendapat arahan, bantuan serta bimbingan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas dari bapak-bapak pembimbing. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. NAWAWI NATSIR, M.Si. Selaku Pembimbing I. dan Bapak Dr. NURHANNIS, M.Si. Selaku Pembimbing II.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari, bahwa penulisan artikel ini tidak terlepas dari segala kekeliruan dan kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo, P. 1971. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)
- Miles, Matthew. B & Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Setijowarno, D, dan R.B, Frazilia. 2001. *Pengantar Sistem Tarnsportasi*. Semarang: Unika Soegijaprata.
- Siahaan, Mariot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI